

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik data sampel yang akan diolah. Gambaran secara umum data dalam setiap variabel penelitian akan terdefiniskan dalam hasil statistik deskriptif. Komponen statistik deskriptif yang digunakan adalah *mean*, *standard deviation*, *minimum*, dan *maximum*. Setelah melalui proses pengujian statistik deskriptif diperoleh hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hasil Statistik Deskriptif

	KOMA	DD	DKI	KI	KA	ML ¹	CSR
Mean	4,1333	6,0333	36,0167	33,9438	28,3925	-14.952	64,69
Std. Deviation	1,1712	1,2883	6,7081	26,4951	26,0070	16.078	16,0820
Minimum	2,00	4,00	20,00	2,55	3,47	-51.970	35,00
Maximum	7,00	10,00	50,00	95,87	96,32	4.702	106,00

Sumber: *Output SPSS* lampiran 2
¹ dalam miliaran rupiah

Tabel 5.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif setiap indikator dalam variabel-variabel penelitian. Lima buah variabel yang akan digunakan, yaitu: mekanisme tata kelola perusahaan sebagai variabel eksogen, struktur kepemilikan sebagai variabel eksogen, auditor eksternal sebagai variabel eksogen, pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai variabel endogen, dan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Ukuran mekanisme tata kelola perusahaan dicerminkan oleh 3 buah indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Komite Audit (KOMA), Dewan Direksi (DD), dan Dewan Komisaris Independen (DKI).

Ukuran komite audit dicerminkan oleh KOMA. Nilai KOMA diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit di setiap perusahaan. Nilai rata-rata KOMA dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2016 sebesar 4,13. Nilai terkecil KOMA sebesar 2,00 dan tertinggi sebesar 7,00. Standar deviasi KOMA adalah 1,17 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar deviasi komite audit yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang rendah tersebut mengindikasikan koefisien keragaman rendah. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah.

Ukuran dewan direksi dicerminkan oleh DD. Nilai DD diukur berdasarkan jumlah dari dewan direksi di perusahaan. Nilai rata-rata DD dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2016 sebesar 6,03. Nilai terkecil DD sebesar 4,00 dan tertinggi sebesar 10,00. Standar deviasi DD adalah 1,28 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar deviasi dewan direksi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang rendah tersebut mengindikasikan koefisien keragaman rendah. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah.

Ukuran dewan komisaris independen dicerminkan oleh DKI. Nilai DKI diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen dari jumlah anggota dewan komisaris. Nilai rata-rata DKI dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2016 sebesar 36,02. Nilai terkecil DKI sebesar 20,00 dan tertinggi sebesar 50,00. Standar deviasi DKI adalah 6,71 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar deviasi dewan komisaris independen yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang rendah tersebut mengindikasikan koefisien keragaman rendah. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah.

Ukuran struktur kepemilikan memiliki 2 buah indikator, yaitu Kepemilikan Institusional (KI) dan Kepemilikan Asing (KA). Ukuran kepemilikan institusional

dicerminkan oleh KI. Nilai KI diukur menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dari total jumlah saham yang beredar. Nilai rata-rata KI dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2016 sebesar 33,94. Nilai terkecil KI sebesar 2,55 dan tertinggi sebesar 95,87. Standar deviasi KI adalah 26,49 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar deviasi kepemilikan institusional yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang rendah tersebut mengindikasikan koefisien keragaman rendah. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah.

Ukuran kepemilikan asing dicerminkan oleh KA. Nilai KA diukur menggunakan persentase jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang beredar. Nilai rata-rata KA dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2016 sebesar 28,39. Nilai terkecil KA sebesar 3,47 dan tertinggi sebesar 96,32. Standar deviasi KA adalah 26,01 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar deviasi kepemilikan asing yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang rendah tersebut mengindikasikan koefisien keragaman rendah. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah.

Ukuran auditor eksternal dicerminkan oleh AE. Nilai AE diukur menggunakan variabel dummy, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* dan 0 jika perusahaan diaudit KAP *Non Big Four*. AE adalah data nonmetrik skala nominal sehingga analisis statistik yang dapat digunakan adalah frekuensi data. Frekuensi data dengan nilai 1 adalah sebanyak 59 (86,8%) dan data dengan nilai 0 adalah sebanyak 9 (13,2%). Artinya, 59 perusahaan atau 86,8% dari perusahaan sampel diaudit oleh KAP *Big Four*.

Ukuran manajemen laba dicerminkan oleh ML. Nilai ML diukur menggunakan akrual diskresioner model Kang dan Sivaramakrishnan (1995).

Nilai rata-rata ML dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2016 sebesar - Rp14.952.000.000.000. Nilai terkecil ML sebesar -Rp51.970.000.000.000 dan tertinggi sebesar Rp4.702.000.000.000. Standar deviasi ML adalah Rp16.078.000.000.000 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar deviasi manajemen laba yang lebih tinggi dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang tinggi tersebut mengindikasikan koefisien keragaman tinggi. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat tinggi.

Ukuran pengungkapan tanggung jawab sosial dicerminkan oleh CSRD. Nilai CSRD diukur dengan memberikan skor untuk setiap item GRI G4 yang diungkapkan (total keseluruhan kategori dan sub kategori GRI G-4 adalah 149 item. Nilai rata-rata CSRD dari perusahaan sampel selama tahun 2013-2016 sebesar 64,69. Nilai terkecil CSRD sebesar 35,00 dan tertinggi sebesar 106,00. Standar deviasi CSRD adalah 16,08 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar deviasi pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang rendah tersebut mengindikasikan koefisien keragaman rendah. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah.

5.2. Analisis Statistik Inferensial

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* merupakan model struktural untuk menilai hubungan antara variabel.

5.2.1 Evaluasi Outer Model

Semua variabel konstruk terdiri atas indikator reflektif. Oleh karena itu, uji model pengukuran digunakan untuk uji validitas konstruk dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas Konstruk

Uji validitas konstruk terdiri dari uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Validitas konvergen merupakan prinsip bahwa nilai yang diperoleh dari pengukuran-pengukuran suatu variabel seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas diskriminan merupakan prinsip bahwa nilai yang diperoleh dari pengukuran-pengukuran variabel yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi.

1.1 Uji Validitas Konvergen

Syarat memenuhi validitas konvergen adalah nilai *loading* (λ) di atas 0,55 (Pirouz, 2006:14) dan *p-value* <0,05 (Sholihin dan Ratmono, 2013:65). Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Outer Loadings

	MTKP	SK	P value
KOMA	(0,768)	-0,276	<0,001
DD	(0,912)	0,053	<0,001
DKI	(0,654)	0,250	<0,001
KI	0,024	(0,832)	<0,001
KA	-0,024	(0,832)	<0,001

Sumber: *Output PLS lampiran 2*

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa hasil *outer loading* pada semua indikator telah memiliki *loading* (λ) lebih dari 0,55 dan *p-value* <0,05 sehingga memenuhi syarat validitas konvergen.

1.2 Uji Validitas Diskriminan

Berdasarkan hasil Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa indikator KOMA memiliki *loading* yang lebih besar ke konstruk MTKP sebesar 0,768 dan nilai *cross-loading* ke konstruk SK sebesar -0,276 lebih rendah dari konstruk MTKP. Indikator DD memiliki *loading* yang lebih besar ke konstruk MTKP sebesar 0,912 dan nilai *cross-loading* ke konstruk SK sebesar 0,053 lebih rendah dari konstruk MTKP. Indikator DKI memiliki *loading* yang lebih besar ke konstruk MTKP

sebesar 0,654 dan nilai *cross-loading* ke konstruk SK sebesar 0,250 lebih rendah dari konstruk MTKP. Indikator KI memiliki *loading* yang lebih besar ke konstruk MTKP sebesar 0,832 dan nilai *cross-loading* ke konstruk SK sebesar 0,024 lebih rendah dari konstruk MTKP. Indikator KA memiliki *loading* yang lebih besar ke konstruk MTKP sebesar 0,832 dan nilai *cross-loading* ke konstruk SK sebesar -0,024 lebih rendah dari konstruk MTKP.

Hasil yang disajikan dalam Tabel 5.3 merupakan metode lain pengujian validitas diskriminan. Syarat terpenuhinya validitas diskriminan jika akar AVE yang ditunjukkan dalam tanda kurung untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model (Ghozali, 2008:42).

Tabel 5.3
Correlations dan Akar AVE

	MTKP	SK
MTKP	(0,785)	0,233
SK	0,233	(0,832)

Sumber: *Output PLS* lampiran 2

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 5.3 dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk MTKP sebesar 0,785 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk MTKP dengan SK yang hanya sebesar 0,233. Begitu juga dengan akar AVE konstruk SK sebesar 0,832 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk SK dengan MTKP yang hanya sebesar 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria validitas diskriminan.

1.3 Uji Reliabilitas

Cronbach's alpha dan *composite reliability* dapat digunakan dalam uji reliabilitas dalam PLS. Tabel 5.4 menyajikan hasil uji reliabilitas dengan nilai yang ditunjukkan oleh *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. Selain itu, Tabel 5.4 juga menyajikan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *Full Collinearity VIF*.

Tabel 5.4
Latent Variable Coefficients

	MTKP	SK	ML*MTKP	ML*SK
Composite reliability	0,826	0,818	0,734	0,749
Cronbach's alpha	0,678	0,654	0,658	0,630
Avg. var. extrac.	0,617	0,692	0,698	0,699
Full collin. VIF	1,135	1,366	1,224	1,371

Sumber: *Output PLS lampiran 2*

Rule of thumb nilai *alpha* atau *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 5.4 nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability* konstruk MTKP dan SK dapat diterima karena lebih besar dari 0,6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Full collinearity VIF merupakan hasil pengujian kolinearitas penuh yang meliputi multikolinearitas vertikal dan lateral. Kolinearitas vertikal, yaitu kolinearitas antara variabel prediktor dalam blok yang sama. Kolinearitas lateral, yaitu kolinearitas antara variabel laten prediktor dengan kriterion (Sholihin dan Ratmono, 2013:73). Nilai *Full collinearity VIF* yang kurang dari 3,3 menunjukkan model bebas dari permasalahan multikolinearitas. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan Tabel 5.4 nilai *Full collinearity VIF* lebih rendah dari 3,3. Hal ini menunjukkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.

5.2.2 Evaluasi Inner Model

Hasil uji *outer model* yang telah dilakukan menghasilkan konstruk yang valid dan reliabel. Uji selanjutnya yang akan dilakukan adalah uji *inner model*. Uji *inner model* merupakan pengujian *goodness of fit model*. Pengujian *goodness of fit model* dilakukan dengan cara melihat hasil *General SEM Analysis Results* pada *output Warp PLS* dan menghitung nilai *predictive-relevance (Q2)*.

Tabel 5.5 menunjukkan hasil dari pengujian *goodness of fit model* penelitian. Pada bagian *Model fit and quality indices* menampilkan tiga indikator fit yang terpenting, yaitu *average path coefficient (APC)*, *average R-squared*

(ARS), dan *average variance inflation factor* (AVIF). Kriteria terpenuhinya *goodness of fit model* nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 2013:61).

Tabel 5.5
General SEM Analysis Results

<i>Average path coefficient</i> (APC) =0,120, P=0,034
<i>Average R-squared</i> (ARS) =0,145, P=0,006
<i>Average block VIF</i> (AVIF) =2,213, <i>acceptable if</i> <= 5, <i>ideally</i> <= 3,3

Sumber: *Output PLS* lampiran 2

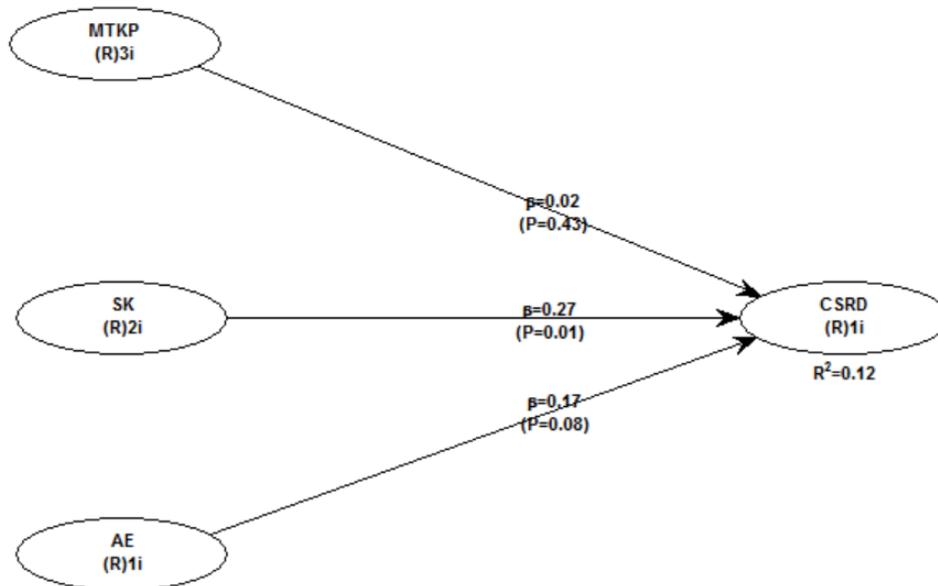
Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 5.5 nilai APC sebesar 0,120 dan ARS sebesar 0,145 serta signifikan $P < 0,05$. Nilai AVIF sebesar 2,213 yang lebih kecil dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria *goodness of fit model* telah terpenuhi.

Selain itu, R^2 untuk konstruk dependen juga dapat digunakan dalam mengevaluasi model struktural dalam PLS. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan berapa persentase variansi konstruk endogen/kriterion dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan memengaruhinya (eksogen/prediktor). Semakin tinggi R^2 menunjukkan model yang baik (Sholihin dan Ratmono, 2013:72). Dalam pengujian R^2 , model memiliki R^2 sebesar 0,14.

5.3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian adalah *one-tailed test*. Hipotesis penelitian H1 sampai dengan H3 menggunakan uji *one-tailed* karena hipotesis berarah, yaitu berpengaruh positif. Gambar 5.1 menyajikan diagram jalur hasil uji hipotesis efek utama (persamaan 1).

Gambar 5.1
Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis Efek Utama



Sumber: *Output PLS lampiran 2*

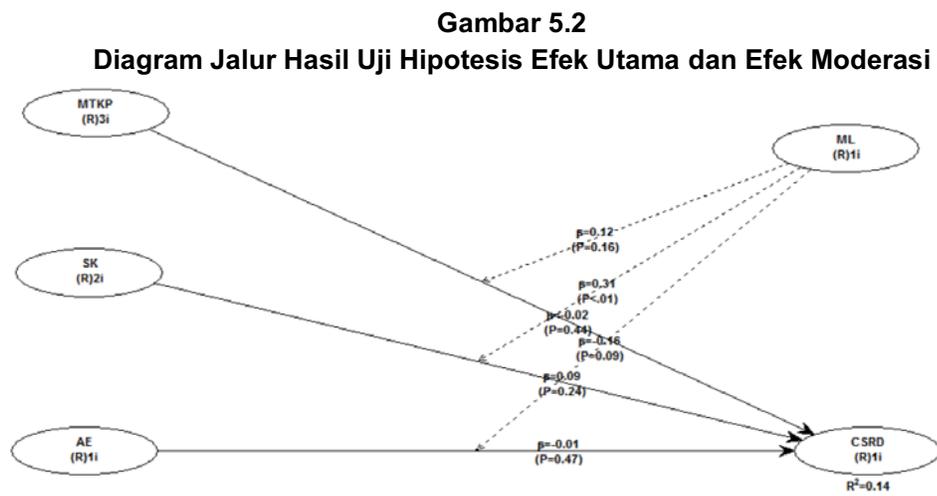
Berdasarkan Gambar 5.1 hasil pengujian pengaruh langsung (*direct effect*) yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mendapatkan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,02 dan tidak signifikan dengan p -value = 0,43 (p -value > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen tidak memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, yaitu mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditolak.
2. Hasil pengujian pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur (β) adalah positif sebesar 0,27 dan signifikan dengan p -value = 0,01 (p -value < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat

jumlah kepemilikan institusional dan kepemilikan asing maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin meningkat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2, yaitu struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diterima.

3. Hasil pengujian pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur (β) adalah positif sebesar 0,17 dan tidak signifikan dengan p -value = 0,08 (p -value > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa KAP *Big Four* tidak memengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3, yaitu auditor eksternal berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditolak.

Selain pengaruh langsung, terdapat pengaruh moderasi dalam model penelitian yang diuji dengan menggunakan *one-tailed test*. Hipotesis penelitian H4 sampai dengan H6 diuji menggunakan uji *one-tailed* karena hipotesis berarah, yaitu berpengaruh negatif. Gambar 5.2 menyajikan diagram jalur hasil uji hipotesis efek utama dan efek moderasi (persamaan 2).



Sumber: *Output PLS lampiran 2*

Berdasarkan Gambar 5.2 hasil pengujian pengaruh moderasi yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian moderasi diperoleh koefisien interaksi manajemen laba terhadap mekanisme tata kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,12 dan tidak signifikan dengan nilai p sebesar 0,16 ($p\text{-value} > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memoderasi pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yaitu, manajemen laba memperlemah pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditolak.
2. Hasil pengujian moderasi diperoleh koefisien interaksi manajemen laba terhadap struktur kepemilikan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,31 dan tidak signifikan dengan nilai p sebesar 0,999¹ ($p\text{-value} < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memoderasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 yaitu, manajemen laba memperlemah pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditolak.
3. Hasil pengujian moderasi diperoleh koefisien interaksi manajemen laba terhadap auditor eksternal dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 0,16 dan tidak signifikan dengan nilai p sebesar 0,09 ($p\text{-value} > 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memoderasi pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6, yaitu manajemen laba memperlemah pengaruh auditor

eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditolak.

5.4. Ikhtisar Hasil Penelitian

Tabel 5.6 menyajikan ikhtisar mengenai hasil penelitian. Ikhtisar hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Jalur (β)	<i>P Values</i>	Keputusan
H1: MTKP \rightarrow CSR	0,02	0,43	Ditolak
H2: SK \rightarrow CSR	0,27	0,01	Diterima
H3: AE \rightarrow CSR	0,17	0,08	Ditolak
H4: MTKP*ML \rightarrow CSR	0,12	0,16	Ditolak
H5: SK*ML \rightarrow CSR	0,31	0,999 ¹	Ditolak
H6: AE*ML \rightarrow CSR	0,16	0,09	Ditolak

Sumber: *Output WarpPLS 5.0*

5.5. Pembahasan

Pada sub bab 5.4 akan dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian dari hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab III. Pembahasan akan didasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan.

5.5.1 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Tidak Berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hipotesis satu menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis satu ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Tashakor (2014), Ho dan Wong (2001), Akhtaruddin dkk.. (2009), dan Pasaribu dkk.. (2015) yang menemukan adanya pengaruh positif mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan TJSL.

Hasil pengujian hipotesis satu menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial

¹) Hasil *p-value (one tailed)* untuk sisi kiri: $1 - 0,01 = 0,99$

perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan konstruk komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Suyono dkk.. (2015) yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak memengaruhi pengungkapan TJSL.

Persyaratan minimum dewan komisaris independen yang ditentukan oleh regulasi Indonesia adalah 30% dari dewan komisaris. Hal ini menyebabkan dewan komisaris independen tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi peraturan perusahaan. Penelitian Fuente, Garcia-Sanchez, dan Lozano (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki peran dalam pembuatan keputusan strategi keberlanjutan perusahaan (*CSR strategy*). Mereka juga menyatakan bahwa dewan komisaris independen adalah profesional eksternal yang tidak memiliki pengetahuan tentang perusahaan secara sempurna dan memiliki kekurangan dalam pelatihan di bidang sosial dan lingkungan sehingga tidak mementingkan pengungkapan TJSL.

Suyono dkk. (2015) juga menemukan adanya indikasi bahwa hampir semua perusahaan Indonesia memiliki komite audit hanya untuk memenuhi persyaratan otoritas pasar modal, tanpa mempertimbangkan kompleksitas perusahaan. Selain itu, anggota komite audit juga tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Hannifa dan Cooke (2005) juga menemukan bahwa dewan direksi memiliki peran yang terbatas dalam memengaruhi peraturan dan praktik TJSL perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pengetahuan dewan direksi mengenai pengungkapan TJSL. Mereka juga menemukan bahwa dalam beberapa situasi, dewan direksi juga memiliki tingkat perhatian yang berbeda terhadap masalah sosial lingkungan. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan tidak memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5.5.2 Struktur Kepemilikan Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hipotesis dua menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis dua diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Alhazaimeh dkk. (2014), Chakroun dan Matoussi (2012), Khan dkk. (2013), dan Ghazali (2007) yang menemukan adanya pengaruh positif struktur kepemilikan terhadap pengungkapan TJSL.

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Kepemilikan institusional yang besar mampu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela sehingga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan TJSL. Selain itu, investor asing juga turut memengaruhi pengungkapan TJSL karena mereka memiliki nilai dan pengetahuan yang berbeda karena pengaruh pasar luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, termasuk informasi sosial dan lingkungan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Ghazali (2007), perusahaan dengan kepemilikan asing lebih 'terlihat' dan lebih memungkinkan untuk menjadi subjek pengawasan pemerintah lokal. Pengungkapan informasi sosial digunakan untuk menghindari kritik bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing hanya mengeksploitasi sumber daya ekonomi dari negara berkembang. Hal ini menyebabkan semakin tinggi struktur kepemilikan suatu perusahaan maka pengungkapan TJSL mereka akan semakin meningkat.

5.5.3 Auditor Eksternal Tidak Berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hipotesis tiga menyatakan bahwa auditor eksternal berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis tiga ditolak. Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa auditor eksternal tidak memengaruhi pengungkapan TJSJL perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Barakat dkk. (2015) serta Uwuigbe dan Egbide (2012).

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soliman (2013), Hossain dan Hammami (2009), serta Barako, Hancock, dan Izan (2006). Hal ini dapat disebabkan oleh peran auditor eksternal yang terbatas pada pengungkapan wajib perusahaan (*mandatory disclosure*) sehingga auditor eksternal tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam pengungkapan TJSJL perusahaan yang bersifat sukarela. Auditor secara umum tidak akan meminta klien mereka untuk melaporkan data selain yang diharuskan oleh standar akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, kantor akuntan publik (KAP) sebagai penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini hanya menekankan pada peran auditor eksternal dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan sehingga auditor eksternal tidak memiliki peran dalam memengaruhi kualitas maupun kuantitas pengungkapan informasi sukarela, salah satunya pengungkapan TJSJL.

Perusahaan yang tercatat pada bursa saham didorong untuk melaporkan informasi yang relevan dan material sebagai tambahan dari informasi yang diwajibkan dalam rangka mempermudah para investor untuk mengukur performa mereka. Mayoritas dari perusahaan besar di Indonesia menggunakan auditor eksternal internasional atau KAP *Big Four*. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* dianggap dapat mengatasi perkembangan terbaru dalam bidang *auditing* dan pelaporan laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan besar juga lebih mengutamakan kualitas dari pelaporan laporan keuangan mereka yang bersifat wajib dibandingkan dengan pengungkapan TJSI yang bersifat sukarela. Selain itu, perusahaan biasanya tidak mengungkapkan informasi sukarela kecuali mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan auditor eksternal *Big Four* tidak memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5.5.4 Manajemen Laba Tidak Memoderasi Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hipotesis empat menyatakan bahwa manajemen laba memperlemah pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga manajemen laba tidak memoderasi pengaruh mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis empat ditolak.

Pengujian efek utama, yaitu pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan TJSI (hipotesis satu) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan TJSI. Hal ini dikarenakan komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris

independen tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi peraturan perusahaan serta memiliki pengalaman dan pengetahuan yang terbatas terkait pengungkapan TJSL.

Hasil pengujian moderasi ini juga konsisten dengan hasil yang ditemukan oleh Guna dan Herawaty (2010) serta Rahman dan Ali (2006), yang menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit, dewan direksi, dan dewan komisaris independen tidak dapat mencegah manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki peran yang efektif dalam mengawasi proses pelaporan laporan keuangan. Dewan direksi yang tidak dapat berfungsi untuk mencegah manajemen laba dapat diakibatkan oleh kurangnya kompetensi dewan direksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan. Selain itu, perusahaan yang tercatat pada bursa efek memiliki dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi persyaratan dari regulator sehingga mereka tidak berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengawasan (Siregar dan Utama, 2008)

Berdasarkan teori institusional (*institutional theory*), mekanisme tata kelola perusahaan adalah praktik yang terjadi sebagai akibat dari paksaan dari regulator yang memaksakan sejumlah praktik dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi, atau sebagai hasil dari proses imitasi. Perusahaan mengadopsi praktik atau regulasi tata kelola perusahaan sebagai hasil dari paksaan legislator yang menyarankan beberapa praktik dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas organisasi, namun tidak ada prediksi bahwa adopsi dari peraturan tersebut akan meningkatkan efektifitas organisasi (Yasser dan Mamun, 2016).

Selain disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu tekanan regulator, alasan mekanisme tata kelola perusahaan tidak memengaruhi manajemen laba dapat

berdasar pada faktor internal (*managerial hegemony theory*). Teori ini menyatakan bahwa keputusan strategis perusahaan didominasi dan didahului oleh manajer. *Managerial hegemony theory* memandang bahwa dewan direksi tidak efektif dalam melakukan tugas pengawasan mereka karena adanya dominasi manajemen (Rahman dan Ali, 2006). Dewan direksi tidak efektif dalam peran pengawasan mereka karena adanya dominasi dari manajemen yang disebabkan dewan direksi memiliki pengetahuan yang kurang memadai mengenai permasalahan perusahaan. Dewan komisaris independen juga memiliki pengetahuan yang kurang memadai mengenai permasalahan perusahaan karena mayoritas dewan komisaris independen sibuk dengan aktifitas lain sehingga mereka mengandalkan manajemen sebagai sumber informasi.

5.5.5 Manajemen Laba Tidak Memoderasi Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hipotesis lima menyatakan bahwa manajemen laba memperlemah pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diukur dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memengaruhi struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis lima ditolak.

Sahin (2011) menemukan bahwa investor institusional memiliki tingkat pergantian portofolio yang tinggi, penggunaan strategi momentum yang tinggi, dan diversifikasi yang tinggi. Mereka tidak dapat berperan aktif dalam mengawasi manajemen perusahaan karena mereka tidak berada dalam jangka waktu yang lama di perusahaan. Claessens dan Fan (2002) juga menemukan bahwa investor institusional tidak memiliki peran aktif dalam mengawasi aktivitas manajemen.

Mereka cenderung untuk menjual saham mereka di perusahaan dengan performa yang buruk dibandingkan menggunakan sumber daya mereka untuk mengawasi dan meningkatkan performa perusahaan. Investor institusional tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan peran pengawasan mereka karena hal ini dapat berakibat pada hubungan bisnis mereka dengan perusahaan (Sundaramurthy, Rhoades, dan Rechner; 2005).

Selain itu, alasan kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi praktik manajemen laba dapat disebabkan oleh kegagalan untuk memperhitungkan lingkungan peraturan tingkat negara, karena lingkungan institusional adalah sarana penting agar investor institusional dapat menggunakan kekuatan pengawasan mereka pada perusahaan investasi mereka (Bao dan Lewellyn, 2017). Peraturan negara yang membatasi peran investor institusi dapat mengurangi peran mereka dalam mencegah praktik manajemen laba. Hal ini mengakibatkan keberadaan investor institusional tidak dapat berfungsi sebagai sistem pengawasan bagi manajemen untuk mengurangi praktik manajemen laba perusahaan.

Ji, Ahmed, dan Lu (2015) juga menemukan bahwa kepemilikan asing tidak memengaruhi kualitas laba perusahaan. Berdasarkan hipotesis asimetri informasi dalam teori agensi, jarak dapat menyebabkan investor asing kesulitan untuk mengawasi proses pelaporan laporan keuangan perusahaan. Asimetri informasi ini mengakibatkan investor asing tidak dapat membantu pengawasan terhadap praktik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajer. Asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham pada pasar negara berkembang umumnya berada pada tingkat yang tinggi karena data arsip mungkin tidak tersedia atau tidak akurat karena kurangnya persyaratan pengungkapan (Bao dan Lewellyn, 2017).

Efektifitas peran pemegang saham pada proses pengawasan bergantung pada tingkat pengendalian yang mereka miliki pada perusahaan. Peran ini dapat terbatas apabila pihak lain memegang kepemilikan mayoritas (misalnya keluarga pendiri perusahaan) (Siregar dan Utama, 2008). Berdasarkan Survey Bisnis Keluarga (PwC, 2014), lebih dari 95% bisnis di Indonesia adalah dimiliki keluarga. Besarnya persentase kepemilikan keluarga ini dapat menyebabkan lemahnya pengaruh pemegang saham institusional dan asing dalam mengawasi praktik manajemen laba.

5.5.6 Manajemen Laba Tidak Memoderasi Pengaruh Auditor Eksternal terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hipotesis enam menyatakan bahwa manajemen laba memperlemah pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memoderasi pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis empat ditolak.

Pengujian efek utama yaitu pengaruh auditor eksternal terhadap pengungkapan TJSJ (hipotesis tiga) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara auditor eksternal terhadap pengungkapan TJSJ. Hal ini dikarenakan peran auditor eksternal yang terbatas pada pengungkapan wajib perusahaan (*mandatory disclosure*) sehingga auditor eksternal tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam pengungkapan TJSJ perusahaan yang bersifat sukarela.

Hasil pengujian moderasi ini konsisten dengan hasil yang ditemukan oleh Ismail dkk. (2015) serta Ishak, Haron, Nik, dan Abdul (2011) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara auditor eksternal dan manajemen laba. Mereka menyatakan bahwa keberadaan auditor *Big Four* tidak mengurangi aktivitas manipulasi laba perusahaan. Bauwhede, Willekens, dan Gaeremynck (2003) menyatakan bahwa toleransi auditor eksternal terhadap manajemen laba

bergantung dari tingkat resiko situasi yang menyebabkan auditor tidak memiliki insentif untuk melaporkan praktik manajemen laba. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya litigasi auditor dan ketakutan mereka terhadap otoritas pajak.

Selain itu, auditor eksternal cenderung kurang memerhatikan praktik penurunan laba karena rendahnya risiko litigasi terkait penurunan laba (Kim, Chung, dan Firth: 2003). Hal ini mengakibatkan auditor eksternal kurang efektif dalam menurunkan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini berkontribusi bagi teori agensi khususnya biaya agensi (*agency cost*) karena keberadaan KAP *Big Four* tidak berperan sebagai mekanisme eksternal yang dapat mencegah atau mengurangi praktik manajemen laba di perusahaan.